



Tanah UNHI Jadi Temuan BPK

Tak Bayar Sewa ke Pemprov

DENPASAR - Permasalahan aset milik Pemprov Bali seperti tak ada habisnya. Belum tuntas tanah 2,5 hektare yang raib di kawasan Hotel Bali Hyatt, Sanur, kini muncul masalah lain. Kali ini yang menjadi kasus adalah tanah seluas 2,74 hektare yang ditempati Universitas Hindu Indonesia (Unhi) di Penatih.

Dalam rapat pansus aset DPRD Bali kemarin (24/8), terungkap jika aset pemprov berupa tanah yang ditempati Unhi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Bahkan, temuan tersebut sejatinya sudah muncul sejak 2013 silam.

Ketua pansus aset DPRD Bali, Nyoman Adnyana mengungkapkan, BPK menjadikan lahan Unhi temuan karena tidak membayar sewa tanah pada pemprov.

Rapat yang diikuti perwakilan UNHI, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) itu berlangsung selama dua jam di ruang Banggar lantai tiga DPRD Bali. Dijelaskan Adnyana, sesuai aturan yang berlaku, pengelolaan Unhi yang berada di bawah yayasan wajib membayar sewa aset pada pemprov.

Nah, selama ini tidak ada kontribusi pembayaran sewa pada Pemprov Bali. Sertifikat yang ada pun menunjukkan hak pakai, bukan hak sewa pakai. "Unhi sudah ada sejak 1960-an. Mereka menempati aset pemprov dengan sistem hak guna pakai, tidak sewa. Rupanya hal itu jadi temuan BPK," papar Adnyana ditemui usai rapat.

Adnyana menambahkan, hal lain yang menjadi perhatian BPK yakni aset pemprov tidak boleh diberikan pada yayasan. Sebab, jika aset diberikan pada yayasan bisa berpotensi dijual atau dibagi-bagi bila yayasan yang bersangkutan bubar.

Lalu bagaimana solusinya? Dijelaskan Adnyana, untuk membayar sewa aset Unhi

tampaknya keberatan. Sebab, dalam operasinya Unhi bukan mengorientasikan keuntungan. Namun, lebih mengutamakan pendidikan agama. Mahasiswa hanya dipungut biaya Rp 1,2 juta selama satu semester.

Karena itu, lanjut Adnyana, pansus dan BPKAD berusaha mencari problem dilematis aturan. Pansus merekomendasikan agar pemprov menghibahkan tanah yang ditempati Unhi. Tanah tersebut dihibahkan pada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).

Status tanah yang dihibahkan juga tidak boleh dipindahtanggakan. "Jadi, kalau ada pihak yang ingin mengaburkan status tanah, harus berurusan dengan PHDI. *Kan*, PHDI tidak mungkin bubar," beber politisi PDI Perjuangan itu.

Meski pansus sudah sepakat, menurut Adnyana keputusan tetap berada pada tangan gubernur. Dia berharap staf BPKAD yang ikut rapat bisa menjelaskan pada gubernur, sehingga gubernur tidak menyamakan Unhi dengan universitas yang lain.

Sementara itu, Kepala UPT Pengamanan Aset Pemprov Bali,

Ketut Nayaka mengaku sudah menyurati yayasan dari Unhi. Yayasan juga sudah audiensi dengan gubernur terkait dengan besaran sewa yang ditawarkan.

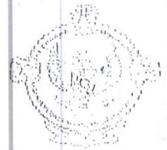
Besaran sewa yang dikenakan Rp 20 ribu per meter persegi setiap tahun atau sekitar Rp 500 juta untuk tanah seluas 2,743 hektare. Namun dengan adanya perda tentang retribusi jasa usaha, tarif itu bisa berkurang hingga separo.

Ditambahkan Nayaka, pemprov sebetulnya telah mencoba berkoordinasi dengan BPK RI untuk mencari pola selain sewa. Misalnya dengan memakai pola hibah. Namun, hibah sesuai ketentuan hanya bisa diberikan pada kegiatan yang bersifat sosial, keagamaan, dan pendidikan non komersial. Itu pun harus ada audit dan laporan keuangan dan akta pendirian yang memang menyatakan yayasan itu nonprofit.

Di lain bagian, Wakil Rektor III Unhi, E. Dewi Yuliana menyatakan keberatan bila harus membayar sewa. Katanya, Unhi selama ini memberikan beasiswa bagi 180 orang mahasiswa setiap tahunnya. Dalam proses pembelajaran, ada 168 dosen yang

Edisi : Jumat 25 Agustus 2017

Hal : 5



Radar Bali

membantu. Jumlah mahasiswa 3.000 dengan iuran SPP Rp 1,2 juta. Kondisi itu menurutnya belum cukup untuk menutupi gaji dosen dan karyawan.

Dewi juga menegaskan, Yayasan Pendidikan Widya Kerthi yang mengelola Unhi bukanlah milik perorangan atau milik pribadi. Yayasan itu milik

umat dan berada di bawah naungan PHDI. Dengan demikian, tidak perlu ada kekhawatiran tanah Pemprov ke depan akan diperjualbelikan

ataupun dialihkan. "Kalau sekarang lagi dibebankan dengan sewa seperti ini, saya rasa merupakan beban bagi kami," terangnya. (san/dot)



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

JADI TEMUAN: Aset Pemprov Bali yang disewa Universitas Hindu Indonesia (UNHI) di Penatih ini jadi temuan BPK karena tak bayar sewa.

Edisi : Jumat 25 Agustus 2017

Hal : _____